PEMBUKTIAN UNSUR PEMBERATAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU ABORSI YANG DILAKUKAN TENAGA MEDIS (Studi Putusan No.22/Pid.Sus/2024/PN Pwk)

Nama Penulis : Sakila Fatchur Rozaq, Esti Aryani, Agatha Jumiati

Afiliasi Penulis : Universitas Slamet Riyadi, Universitas Slamet Riyadi

Alamat Surel : sakilafar@gmail.com, estiaryani29@gmail.com, agathajum5@gmail.com

Abstract

Law enforcement against criminal acts of abortion involving health workers in Purwakarta based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. In the Indonesian legal system, abortion under certain conditions can be categorized as abortion provokatus medicinalis, which is considered legally valid if carried out based on medical indications. Conversely, abortions carried out without valid medical reasons are categorized as abortion provokatus criminalis, which is classified as a criminal act. One of them is a case involving a medical worker named Teguh Setiawan. Based on the Decision of the Purwakarta District Court Number 22 / Pid.Sus / 2024 / PN Pwk. The research method used is normative juridical research, namely referring to legal norms in statutory regulations, court decisions, and norms prevailing in society. The results of this study indicate that the sentence given by the panel of judges has not been maximized. The basis for the judge's consideration in sentencing the defendant was proven legally and convincingly to have violated Article 429 of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health. Where to get additional or aggravated punishment. The judge sentenced the defendant to 5 (five) years in prison, which should have been 8 (eight) years in prison, and because he was a medical worker or health worker, it was added 1/3 (one third) of 8 (eight) years, namely 2 (two) years 6 (six) months. The total sentence is 10 (ten) years 6 (six) months in prison.

Keywords: *Abortion, Medical Personnel, Criminal Acts*

Abstrak

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang melibatkan tenaga kesehatan di Purwakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam sistem hukum Indonesia, aborsi dalam kondisi tertentu dapat dikategorikan sebagai abortus provokatus medicinalis, yang dianggap sah secara hukum jika dilakukan berdasarkan indikasi medis. Sebaliknya, aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis yang sah masuk dalam kategori abortus provokatus criminalis, yang tergolong sebagai tindak pidana. Salah satunya adalah kasus yang menjerat seorang tenaga medis bernama Teguh Setiawan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pwk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian

yuridis normatif yaitu mengacu pada norma hukum dalam aturan undang-undang, putusan pengadilan, dan norma yang berlaku di masyarakat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan oleh majelis hakim belum maksimal. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 429 UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dimana mendapatkan tambahan hukuman atau diperberat. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara yang seharusnya mendapatkan hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan karena tenaga medis atau tenaga kesehatan maka ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari 8 (delapan) tahun yaitu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Total hukuman 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Kata Kunci: Aborsi, Tenaga Medis, Tindak Pidana

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk di bidang kesehatan, dengan hadirnya alat medis canggih berbasis teknologi. Kemajuan ini membantu dokter dalam memberikan pengobatan yang lebih efektif dan berkualitas. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang oleh dokter dalam praktik pengobatan yang tidak sesuai dengan prosedur, seperti tindakan aborsi ilegal yang dilakukan secara tidak semestinya.¹

Dalam sistem hukum Indonesia, aborsi dalam kondisi tertentu dapat dikategorikan sebagai abortus provocatus medicinalis, yang dianggap sah secara hukum jika dilakukan berdasarkan indikasi medis. Sebaliknya, aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis yang sah masuk dalam kategori abortus provocatus criminalis, yang tergolong sebagai tindak pidana. Secara prinsip, tindakan medis berupa aborsi bukanlah suatu kejahatan jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, namun dalam praktiknya, terdapat kasus aborsi ilegal yang dilakukan secara terselubung. Ironisnya, dalam beberapa kasus, justru tenaga kesehatan atau dokter yang seharusnya menaati kode etik profesinya malah terlibat dalam praktik aborsi ilegal.

Aborsi yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 429 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan hukuman pidana penjara hingga 15 tahun serta denda maksimal sebesar 1 miliar rupiah. Dengan demikian, aborsi yang dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku dikategorikan sebagai tindakan ilegal yang tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman, gaya hidup bebas semakin marak, menyebabkan banyak masyarakat meninggalkan budaya Timur dan beralih ke sistem demokrasi liberal yang

¹ ST. Harum Pudjiarto & G. Widiartana Suryono Ekotama, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: cetakan pertama, Andi Offset, hal 12.

lebih menitikberatkan hak individu. Dalam sistem ini, nilai-nilai moral cenderung terabaikan, dan pemerintah pun tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri hak individu tersebut. Salah satu dampak dari perubahan ini adalah meningkatnya perilaku seks bebas yang sering kali berujung pada kehamilan di luar nikah. Dalam banyak kasus, kehamilan yang tidak diinginkan jarang dipertahankan, dan pelaku cenderung memilih aborsi sebagai solusi.

Kehamilan yang tidak diinginkan dapat menimbulkan kecemasan yang luar biasa bagi wanita yang mengalaminya, sehingga banyak di antara mereka bersedia melakukan berbagai cara untuk mengakhiri kehamilan tersebut. Ketika usaha pribadi untuk menggugurkan kandungan gagal, wanita tersebut umumnya mencari bantuan dari individu atau pihak yang terbiasa melakukan praktik aborsi. Proses ini sering kali dilakukan dengan cara yang lebih berisiko dan mengerikan dibandingkan dengan upaya aborsi mandiri, karena menggunakan metode yang kasar atau alat yang tidak aman.

Dalam perkara pidana terkait aborsi, pembuktian dilakukan melalui alat bukti seperti keterangan ahli dan *Visum et Repertum*. Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi dalam beberapa kasus sulit untuk membedakan keduanya. Seorang ahli terkadang juga dapat berperan sebagai saksi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), saksi diwajibkan untuk mengucapkan sumpah, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan ahli. Namun, disebutkan bahwa baik saksi maupun ahli yang menolak untuk memberikan sumpah tanpa alasan yang sah tetap dapat dimintai keterangannya. Isi keterangan yang diberikan juga memiliki perbedaan, di mana saksi memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman pribadinya, sementara ahli memberikan penilaian dan kesimpulan atas suatu fakta yang telah terjadi.²

salah satunya adalah kasus yang menjerat seorang tenaga medis bernama Teguh Setiawan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pwk, terdakwa yang berprofesi sebagai perawat didakwa melakukan tindakan aborsi terhadap seorang perempuan bernama Wulan Anjarsari, yang mengakibatkan kematian korban. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara memberikan obat jenis misoprostol kepada korban tanpa memenuhi syarat medis yang sah. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kejang-kejang hingga akhirnya meninggal dunia.

Tindakan aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis dalam kasus ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih dalam. Dari aspek hukum pidana, perbuatan tersebut melanggar Pasal 429 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindakan aborsi secara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam putusan pengadilan, terdakwa dijatuhi hukuman enam tahun penjara atas perbuatannya.

² Ekotama, Suryono, dkk, 2001, *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan*, Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta, hal 15.

B. Pembahasan

Pembuktian tindak pidana aborsi umumnya menggunakan alat buktiketerangan ahli dan visum et repertum. Keterangan ahli bersifat penilaian profesional terhadap fakta yang ada, berbeda dengan keterangan saksi yang berdasarkan pengalaman langsung. Dalam praktik, seorang ahli bisa juga berperan sebagai saksi.

Aborsi terbagi menjadi dua jenis utama: abortus provocatus medicinalis (aborsi atas indikasi medis, legal dan dilakukan oleh tenaga medis kompeten) dan abortus provocatus criminalis (aborsi ilegal tanpa indikasi medis dan bertentangan dengan hukum). Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 menggantikan UU Kesehatan lama dan menegaskan bahwa aborsi dilarang kecuali dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat medis atau kehamilan akibat pemerkosaan.

Pasal 60 UU Kesehatan mengatur bahwa aborsi hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar, dan harus mendapat persetujuan perempuan hamil serta suami, kecuali korban pemerkosaan. Batas usia kandungan untuk aborsi diperbolehkan naik dari 6 minggu menjadi 14 minggu.

Pasal 428 mengatur pidana bagi yang melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan, dengan ancaman hukuman penjara 5-15 tahun tergantung ada tidaknya persetujuan dan apakah mengakibatkan kematian. Pasal 429 mengatur pemberatan hukuman bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan atau membantu aborsi ilegal, yaitu tambahan hukuman sepertiga dari pidana pokok dan pencabutan hak profesi.

Ketentuan ini menunjukkan upaya negara menindak aborsi ilegal, terutama yang dilakukan oleh tenaga medis tanpa alasan sah, untuk melindungi hak hidup janin dan menjamin praktik medis yang sesuai hukum. Pemberatan sanksi bagi tenaga medis juga berfungsi sebagai pencegahan agar profesi kesehatan menjalankan tugas secara etis dan profesional.

1. Pertimbangan Hakim Terkait Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Penulis tidak sependapat dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dalam perkara tindak pidana aborsi Nomor 22/Pid.Sus/2024 Pwk yang menjatuhkan hukuman hanya 5 tahun penjara kepada terdakwa Teguh Setiawan Bin Wahyu Setiana. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa secara sadar membantu melakukan aborsi terhadap Wulan Anjarsari dengan persetujuan pihak terkait, meskipun awalnya sempat menolak. Hasil visum et repertum menunjukkan korban sedang hamil 4-5 bulan dan meninggal akibat penggunaan zat misoprostol yang memicu kontraksi rahim dan pendarahan masif. Terdakwa melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan pada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, sehingga unsur tindak pidana yang mengakibatkan kematian telah terbukti dan menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban.

Mengacu pada Pasal 428 dan 429 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaku aborsi yang dilakukan tenaga medis dengan akibat kematian perempuan seharusnya mendapat hukuman maksimal 8 tahun penjara ditambah satu pertiga karena pelaku adalah tenaga medis. Pasal tersebut menegaskan bahwa jika aborsi dilakukan tanpa persetujuan atau mengakibatkan kematian, pidana dapat mencapai 15 tahun. Dalam mempertimbangkan putusan, hakim seharusnya memperhatikan faktor pemberat seperti perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat, profesinya sebagai tenaga kesehatan yang justru melakukan tindakan di luar kewenangan, dan akibat fatal yang dialami korban. Di sisi lain, keadaan meringankan seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa serta belum pernah dihukum sebaiknya dipertimbangkan tanpa mengurangi bobot hukuman.

Penulis menilai hukuman 5 tahun penjara yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan beratnya kejahatan yang menyebabkan kematian korban. Terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman penjara 8 tahun ditambah satu pertiga sesuai Pasal 429, sehingga total hukuman menjadi sekitar 10 tahun 6 bulan, serta pencabutan hak menjalankan profesi tenaga medis. Hal ini penting sebagai bentuk keadilan bagi korban dan keluarganya sekaligus upaya pencegahan agar tenaga medis tidak menyalahgunakan profesinya dalam melakukan aborsi ilegal. Dengan demikian, putusan hakim sebaiknya mempertimbangkan seluruh unsur pidana dan faktor pemberat untuk memberikan efek jera dan perlindungan hukum yang lebih tegas.

C. Kesimpulan

Dalam kasus tindak pidana aborsi, pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat bukti seperti keterangan ahli dan Visum et Repertum. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, aborsi yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan atau tidak sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi ini bisa mencapai 8 tahun penjara, dan jika mengakibatkan kematian, hukuman bisa lebih berat, yakni hingga 10 tahun penjara. Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang terlibat dalam aborsi ilegal dapat dijatuhi sanksi pidana yang lebih berat. Berdasarkan Pasal 429 UU No. 17 Tahun 2023, sanksi pidana bagi tenaga medis yang terlibat dapat ditambah sepertiga, dan hak untuk menjalankan profesi tertentu dapat dicabut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia memberikan pemberatan sanksi terhadap pelaku aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis, mengingat beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan cukup ringan dalam tindak pidana aborsi pada putusan perkara Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Pwk, akibat aborsi yang dilakukan tenaga medis atau tenaga kesehatan korban meninggal yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan persetujuan perempuan tersebut dengan mengakibatkan kematian pada perempuan tersebut.

Daftar Pustaka

Ekotama, Suryono, dkk, 2001, *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan*, Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta.

Herdiyan Ibnu & Henry Arianto, *Abortus dalam Hukum Pidana Indonesia*, 2015. ibid., Pasal 60 ayat (2).

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013

Suhayati, Monika, dan Noverdi Puja Saputra. "Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi." *Info Singkat*, Vol. XII, No. 19/I/P3DI, Oktober 2017.

Soerjono Soekanto. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, hal 66. ibid hal 10.

Soerjono Soekanto, 2016 ,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. Hal 44.

ST. Harum Pudjiarto & G. Widiartana Suryono Ekotama, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: cetakan pertama, Andi Offset.

Soerjono Soekanto. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, hal 66.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat (31).